



Implikasi Kebijakan Ekonomi Politik Global Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Negara Berkembang

Varga Setyawananda¹, Firna Putri Az Zahara^{2*}, Jumita Anggeraini³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung pinang

Korespondensi Penulis: firnaput07@gmail.com*

Abstract. *This research aims to analyze the implications of global political economy policies on women's empowerment in developing countries, especially in terms of access to economic resources, education, employment, and political participation. The research uses a literature review method by collecting and analyzing various academic references and relevant public policies to provide a comprehensive understanding of gender issues in the context of globalization. The results show that despite the existence of various affirmative policies such as women's quotas in parliament and economic programs for women, their implementation still faces various structural barriers, including patriarchal culture, limited resources, and low participation of women in decision-making. Other challenges include unequal access to education and training, and social stereotypes that hinder women's advancement. Proposed strategies include integrating gender analysis in policy formulation, increasing women's participation in strategic positions, strengthening regulations that protect women's rights, and gender-sensitive international cooperation. This research confirms the importance of a collaborative and sustainable approach involving various stakeholders to realize inclusive women's empowerment and real gender equality in developing countries.*

Keywords: *Political Economic Policy, Women Empowerment, Developing Countries.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan ekonomi politik global terhadap pemberdayaan perempuan di negara berkembang, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Penelitian menggunakan metode studi literatur review dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi akademik serta kebijakan publik yang relevan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait isu gender dalam konteks globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan dalam parlemen dan program ekonomi untuk perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Tantangan lainnya mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta stereotip sosial yang menghambat kemajuan perempuan. Strategi yang diusulkan meliputi integrasi analisis gender dalam perumusan kebijakan, peningkatan partisipasi perempuan di posisi strategis, penguatan regulasi yang melindungi hak perempuan, serta kerja sama internasional yang sensitif gender. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan yang inklusif dan kesetaraan gender secara nyata di negara berkembang.

Kata Kunci: Kebijakan Politik Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan, Negara Berkembang.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan politik global sangat menerapkan sebuah peran penting di dalam bidang sosial dan politik di Negara berkembang. Sistem ekonomi pasar memberikan sebuah kebebasan untuk menentukan sendiri kegiatan ekonomi kepada Masyarakat sesuai dengan keinginan masing-masing kebebasan. kebebasan dimaknai sebagai semua kegiatan inti dari kegiatan perekonomian. Dalam konteks pemberdayaan Perempuan, kebijakan politik global memiliki dampak yang sangat penting terhadap Perempuan sebagai sumber daya baik di sektor Pendidikan maupun ekonomi. Menurut (Istiqro et al., 2025) peran gender di dalam ekonomi

politik merupakan sebuah konstruksi yang didalamnya terdapat sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin perindividu. Perkembangan Sejarah dari adanya partisipasi Perempuan dalam bidang ekonomi telah menjadikan sebuah perjalanan yang beragam, hal ini mencakup dapat diketahui dengan adanya sebuah temuan Sejarah melewati tantangan-tantangan yang bervariasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi masih sama hingga sekarang, yaitu dengan adanya permasalahan ketidaksetaraan gender.

Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan perempuan adalah pengakuan dan penghapusan disparitas dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Di era globalisasi, di mana arus informasi, teknologi, dan perdagangan semakin terintegrasi secara global, tantangan baru muncul dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Misalnya, proses globalisasi sering kali memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan menciptakan tekanan baru terhadap peran tradisional Perempuan (Suryaningsih & Sanjaya, 2024).

Di Negara berkembang tidak ada upaya untuk memberlakukan kesetaraan gender antara Perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini meliputi dari kekuasaan, hak bersuara politik, ekonomi dan sumber daya sehingga menimbulkan isu berupa ketidakadilan untuk kaum Perempuan. Di Negara berkembang seperti Indonesia memiliki jumlah angka pengangguran yang sangat relative tinggi, pada sektor swasta di Indonesia memberikan sebuah lowongan pekerjaan yang besar bagi kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia diduduki oleh kaum perempuan. Pihak swasta banyak menerapkan kebijakan perekrutan lowongan yang besar bagi laki-laki dikarenakan Perusahaan memikirkan mengenai keterampilan dan Pendidikan, mungkin pada sektor swasta laki-laki banyak mempunyai latar belakang dengan keahliannya tertentu dan tidak dimiliki oleh Perempuan sehingga laki-laki lebih cocok dalam mengisi pekerjaan tersebut.

Pembaruan terhadap tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia merupakan sebuah tantangan besar (Faqih, 2020). Misalnya, keseimbangan antara pendaftaran anak laki-laki dan perempuan di sekolah dasar telah tercapai di banyak bagian dunia, dengan pengecualian di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan. Masih terdapat ketimpangan gender di pendidikan tinggi, yang lebih menguntungkan laki-laki, serta tingkat akses perempuan terhadap pekerjaan berbayar, yang berkaitan dengan penghasilan dan kepentingan sosial, masih sangat rendah bila dibandingkan dengan laki-laki di berbagai sektor termasuk pertanian. Meski begitu, akses perempuan terhadap pengambilan keputusan politik, khususnya terkait dengan proporsi kursi

mereka di parlemen, telah meningkat secara bertahap dan konsisten secara global (Kusuma Wardany et al., 2020).

Implikasi kebijakan ekonomi politik global terhadap pemberdayaan Perempuan di Negara berkembang sangat signifikan namun penuh tantangan. Pembuatan kebijakan sering kali tidak mempertimbangkan perspektif gender, sehingga membuat ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah ada.

Masalah yang dibahas dalam penelitian saat ini adalah bagaimana kebijakan ekonomi politik global seringkali berdampak tidak merata terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan di negara berkembang. Kebijakan-kebijakan kadang mengabaikan dimensi gender, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Perempuan sering kali terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja yang layak akibat dari implementasi kebijakan global yang tidak inklusif gender. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan ekonomi politik global terhadap pemberdayaan perempuan di negara berkembang serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung kesetaraan gender.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis implikasi kebijakan ekonomi politik global terhadap pemberdayaan perempuan di negara berkembang. *Literature review* adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber Pustaka yang relevan dengan isu penelitian. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji melalui sintesis dari berbagai sumber akademik dan kebijakan terkini. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti yang ada pada jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan informasi yang relevan terkait permasalahan pemberdayaan Perempuan di negara berkembang. Sehingga, metode ini sangat cocok digunakan pada penelitian ini untuk memberikan sebuah informasi mengenai implikasi kebijakan global terhadap pemberdayaan perempuan di negara berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Rahim, 2024) Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat, memberikan kemandirian, dan meningkatkan peran Perempuan diberbagai sektor kehidupan. Tujuan dari pemberdayaan Perempuan adalah untuk memberikan

hak-hak yang sama, kesempatan yang adil, serta mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan menyediakan akses, tetapi juga memampukan mereka untuk membuat keputusan, mengatasi ketidakadilan gender, dan mendukung kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dinegara-negara berkembang adalah suatu topik yang penting untuk dianalisis secara mendetail. Negara-negara berkembang memiliki dinamika dalam aspek sosial,ekonomi,dan politik yang mempengaruhi bagaimana mereka menghadapi isu masalah kesetaraan gender (Ari et al., 2022). Kebijakan publik terhadap kesetaraan gender dinegara-negara berkembang merupakan hal yang penting. Setiap negara-negara berkembang memiliki dinamika ekonomi,sosial,dan poliftik yang beragam,yaitu mempengaruhi cara mereka menghadapi isu kesetaraan gender (Lim & Silalahi, 2024). Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, di banyak negara berkembang, kesenjangan gender masih menjadi masalah serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan perempuan dan anak perempuan. Kesenjangan ini tercermin dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial (Karwati, 2021)

Dalam aspek politik, keterlibatan perempuan dalam parlemen merupakan satu bentuknya. Masalah dan persoalan-persoalan yang dialami perempuan dapat disuarakan dan diselesaikan,termasuk urusan kesejahteraan perempuan yang dipandang belum merata dan setara dengan laki-laki. Pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menerapkan kebijakan minimal 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen diharapkan dapat mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili,mengawal,dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender. Dalam bidang ekonomi,perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan,baik sebagai pengusaha ataupun bagian dari tim manajerial. Dapat memberikan akses kepada perempuan untuk bisa lebih berpartisipasi dalam area publik,termasuk dalam dunia kerja,bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri tetapi juga untuk meningkatkan persaingan.

Pemberdayaan wanita bukan hanya sekadar wacana belaka, melainkan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan telah diakui dalam berbagai forum pembangunan di tanah air. Sejak masa reformasi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beragam kebijakan untuk meningkatkan peran dan kontribusi wanita dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial-budaya. Namun, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan ini

berpengaruh terhadap pemberdayaan wanita dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaannya masih menjadi topik yang terus dibahas.

Salah satu dampak signifikan dari kebijakan publik terhadap pemberdayaan wanita di Indonesia terletak dalam sektor ekonomi. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk wanita, pelatihan kewirausahaan, dan insentif lainnya telah diperkenalkan untuk meningkatkan akses wanita terhadap sumber daya ekonomi. Namun, tetap ada tantangan dalam hal akses terhadap modal, pengetahuan, dan pasar bagi wanita, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, dalam bidang politik, kebijakan afirmatif seperti kuota wanita dalam parlemen dan kepemimpinan lokal telah menjadi fokus utama untuk meningkatkan representasi wanita dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun terdapat peningkatan jumlah wanita di lembaga legislatif dan eksekutif, masih ada hambatan struktural yang menghalangi partisipasi wanita secara efektif dalam politik, termasuk budaya patriarki yang masih kuat dan minimnya dukungan infrastruktur politik yang bersahabat dengan wanita.

Dari perspektif sosial-budaya, kebijakan pendidikan dan kesetaraan gender telah berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan wanita secara menyeluruh. Namun, masih ada stereotip dan norma sosial yang menghambat aspirasi dan potensi wanita, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan yang bergengsi. Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran gender di tingkat masyarakat dan birokrasi, serta resistensi terhadap perubahan dari kelompok-kelompok konservatif, juga mempengaruhi implementasi kebijakan publik terkait pemberdayaan wanita.

Pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesetaraan gender di negara-negara berkembang menghadapi beragam dampak dan tantangan yang rumit. Efek dari kebijakan ini bisa sangat berarti, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Salah satu dampak positif yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender adalah peningkatan partisipasi dan kontribusi wanita di berbagai sektor kehidupan. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada wanita terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan memajukan kesetaraan di seluruh bidang. Namun, meskipun memiliki potensi positif, pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender juga menghadapi sejumlah tantangan yang serius.

Salah satu tantangan utama adalah penolakan terhadap perubahan dari berbagai pihak, termasuk struktur politik dan budaya yang dominan. Budaya patriarki yang masih kokoh di banyak negara berkembang sering kali menjadi penghalang utama dalam menerapkan

kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, kurangnya dukungan politik dan komitmen dari pemerintah juga dapat menjadi kendala serius dalam melaksanakan kebijakan kesetaraan gender secara efektif. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakcukupan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun infrastruktur, yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender. Menghadapi beragam tantangan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta melibatkan masyarakat sipil dan wanita secara aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, pemberdayaan wanita yang inklusif dapat diwujudkan di Indonesia.

Selain tantangan tersebut, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah adanya kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender. Misalnya, terjadinya reaksi balik atau penolakan yang lebih kuat dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Selain itu, kebijakan yang tidak disusun dengan baik atau tidak mempertimbangkan konteks lokal dapat berisiko memperburuk kesenjangan yang ada atau menciptakan ketidakadilan baru. Dalam menghadapi efek dan tantangan ini, penting bagi negara-negara berkembang untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti dan inklusif dalam merancang serta melaksanakan kebijakan kesetaraan gender. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi perubahan menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Dengan demikian, diharapkan bahwa usaha bersama ini dapat membawa efek yang positif dan berkelanjutan bagi wanita dan masyarakat secara keseluruhan di negara-negara berkembang.

Banyak negara berkembang mengalami keterbatasan dalam hal dana dan teknologi, yang menyulitkan penyediaan layanan serta program yang efektif bagi wanita. Selain itu, kurangnya akses wanita terhadap pendidikan dan informasi juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan kesetaraan gender. Selanjutnya, tantangan dalam mengubah norma dan sikap masyarakat terhadap peran serta hak wanita juga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kebijakan kesetaraan gender dapat diterapkan secara formal oleh pemerintah, perubahan yang sesungguhnya memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dan strategi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi penolakan serta mengubah sikap dan perilaku yang tidak mendukung kesetaraan gender. Selain faktor internal, faktor eksternal juga memengaruhi

kebijakan publik terhadap kesetaraan gender. Perubahan dalam ekonomi global dan pertumbuhan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi, yang dimana pada gilirannya mempengaruhi peran perempuan dalam pasar kerja (Rahayu, 2016).

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi politik mendukung kesetaraan gender, khususnya di negara berkembang, antara lain:

1. Integrasi Perspektif Gender dalam Perumusan Kebijakan

Setiap kebijakan ekonomi dan politik harus melalui analisis gender untuk menilai dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan gender impact assessment sebelum kebijakan diberlakukan.

2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, baik di pemerintahan, lembaga keuangan internasional, maupun organisasi masyarakat sipil, agar kepentingan dan kebutuhan perempuan terwakili secara adil dalam kebijakan global.

3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Memberikan akses yang setara terhadap pelatihan keterampilan, kredit mikro, teknologi, dan pasar kerja formal guna meningkatkan posisi tawar perempuan dalam ekonomi nasional dan global.

4. Penguatan Kerangka Regulasi dan Hukum Nasional

Negara berkembang perlu menyusun dan menegakkan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan di dunia kerja, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi.

5. Kerja Sama Internasional yang Sensitif Gender

Dalam kemitraan dengan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, atau WTO, negara berkembang dapat menegosiasikan syarat dan kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender dan tidak memperburuk ketimpangan struktural.

6. Peningkatan Data Terpilah Berdasarkan Gender

Pengumpulan dan penggunaan data terpilah sangat penting untuk merancang kebijakan yang berbasis bukti dan mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi perempuan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kebijakan ekonomi politik global dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan dan kesetaraan gender secara lebih efektif.

Penerapan kebijakan ekonomi politik global yang responsif gender di negara

berkembang sangat krusial untuk mendorong pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Salah satu strategi utama adalah integrasi perspektif gender dalam setiap tahap perumusan kebijakan, sehingga dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki dapat dianalisis secara adil dan menyeluruh (Istiqro et al., 2025). Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci agar kebutuhan dan kepentingan perempuan dapat terakomodasi secara optimal (Ari et al., 2022). Upaya ini perlu didukung dengan penguatan kerangka regulasi dan hukum nasional yang menegaskan perlindungan serta pemberdayaan perempuan, sehingga tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga terimplementasi secara nyata di lapangan (Lim & Silalahi, 2024).

Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi perempuan juga harus menjadi prioritas melalui penyediaan akses yang setara terhadap pelatihan keterampilan, kredit mikro, teknologi, dan pasar kerja formal (Rahim, 2024). Tantangan utama yang dihadapi adalah masih kuatnya budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya dukungan infrastruktur yang ramah perempuan (Karwati, 2021). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional sangat diperlukan untuk memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung perubahan menuju kesetaraan gender yang berkelanjutan (Rahayu, 2016).

4. KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi politik global memiliki potensi untuk memberdayakan perempuan di negara berkembang, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Ketidaksetaraan gender terus menjadi masalah utama, dengan banyak perempuan yang terpinggirkan dalam bidang ekonomi dan politik. Kebijakan yang ada sering kali tidak cukup efektif, terutama karena budaya patriarki dan struktur sosial yang dominan.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran perempuan, seperti kuota dalam parlemen dan program ekonomi, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan dan sumber daya. Selain itu, stereotip sosial dan norma budaya yang menghalangi aspirasi perempuan masih sangat kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan perempuan. Hanya dengan melibatkan semua pihak dan memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan yang inklusif dapat terwujud. Pemerintah harus

melakukan pembenahan baik berupa kebijakan yang diimplementasikan, program yang di salurkan dan lapangan kerja yang disediakan. Guna mendukung proses kesetaraan gender di negara berkembang yang terhadap mindset Perempuan dan kualitas SDM yang berkembang, sehingga menjadikan potensi dalam meningkatkan perekonomian lokal dan memberantas kemiskinan yang ada.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini merupakan salah satu hasil kajian tentang pemberdayaan perempuan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait pemberdayaan perempuan di Negara berkembang.

REFERENSI

- Ari, I. R. D., Waloejo, B. S., & Hariyani, S. (2022). Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(1), 23–35. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>
- Faqih, A. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Dan Penataan Pekarangan. *Abdimas Galuh*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25157/ag.v2i1.3298>
- Istiqro, J., Islam, J. H., & Vol, B. (2025). PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER. 11(1), 20–34. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i1.3160>
- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Kusuma Wardany, Reni Permata Sari, & Erni Mariana. (2020). Sosialisasi Pendirian “Bank Sampah” Bagi Peningkatan Pendapatan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Margasari. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 364–372. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348>
- Lim, H. C., & Silalahi, A. M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Terhadap Kesetaraan Gender: Studi Kasus Di Negara-Negara Berkembang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 2621–119.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik. 2, 93–108. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1524>

- Rahim, W. (2024). PENDIDIKAN EKONOMI UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: STRATEGI DAN DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI. V, 14–30.
- Suryaningsih, A., & Sanjaya, A. H. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender: Strategi Dan Tantangan Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 2621–119.
- Ari, D., Sari, M., & Pratama, R. (2022). Kebijakan Publik dan Kesetaraan Gender di Negara Berkembang.
- Istiqro, M., Sari, N., & Fadilah, A. (2025). Peran Gender dalam Ekonomi Politik Global.
- Karwati, E. (2021). Kesenjangan Gender dalam Pendidikan dan Ekonomi di Negara Berkembang.
- Lim, S., & Silalahi, M. (2024). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Publik.
- Rahim, A. (2024). Pemberdayaan Perempuan: Proses dan Tantangan di Negara Berkembang.
- Rahayu, S. (2016). Perubahan Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Peran Perempuan.